

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU
XVII/2019 TERKAIT PENARIKAN KENDARAAN SECARA PAKSA OLEH
DEBT COLLECTOR AKIBAT KREDIT MACET**

Oleh

Ni Luh Meliyani, NIM 1814101019

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia dalam hal terjadinya penarikan kendaraan motor secara paksa oleh *debt collector* akibat kredit macet dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berguna untuk mendapatkan konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pertimbangan hakim mahkamah konstiusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia telah membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan “cedera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. 2) Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi jaminan fidusia membawa implikasi kekuatan eksekutorial, selain itu juga jika putusan tersebut diterapkan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi fidusia akan menimbulkan proses eksusi yang berbelit-belit, terjadinya biaya tinggi, kerugian, inefisiensi, berkurangnya potensi pendapatan negara, proses eksekusi jaminan lebih Panjang, penyelesaian kredit yang lebih lama serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan problem dalam implementasi di lapangan, juga menimbulkan adanya konflik norma yang baru, yaitu munculnya pertentangan antara amar putusan MKRI dengan bunyi Pasal 30 UUJF, dimana pada putusan MKRI mengedepankan penyerahkn sukarela, disisi lain Pasal 30 memberikan hak pada Penerima Fidusia untuk mengambil objek jaminan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketya dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi

Kata Kunci : Kredit Macet, Putusan Mahkamah Konstitusi, *Debt Collector*,
Kendaraan

**ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER
18/PUU-XVII/2019 REGARDING THE FORCED REPOSSESSION OF
VEHICLES BY DEBT COLLECTORS DUE TO DEFAULTED LOANS**

By

Ni Luh Meliyani, NIM 1814101019

Law Studies Program

ABSTRACT

"This research aims to identify, analyze, and understand the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 regarding the execution of fiduciary guarantees in cases of forced vehicle repossession by debt collectors due to loan defaults in society. This study employs normative legal research methods using a conceptual approach, a legislative approach, and a case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources to derive conclusions relevant to the issues under investigation.

The findings of the research indicate that: 1) The Constitutional Court's considerations in Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantees have resulted in juridical consequences, creating legal uncertainty about when precisely the fiduciary grantor (debtor) has committed a "breach of contract," which results in the fiduciary recipient (creditor) having absolute authority to sell the fiduciary guarantee object that is in the debtor's possession. 2) The impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantees has implications for the executorial power. Moreover, if this decision is implemented as the basis for fiduciary execution, it will lead to a convoluted execution process, high costs, losses, inefficiencies, reduced state revenue potential, a longer guarantee execution process, prolonged credit settlement, and will cause legal uncertainty and issues in field implementation. It will also result in a new normative conflict, specifically the contradiction between the Constitutional Court's ruling, which emphasizes voluntary surrender, and Article 30 of the Fiduciary Law, which grants the fiduciary recipient the right to seize the guaranteed object. Dispute resolution can be carried out through both litigation and non-litigation methods."

Keywords : *Non-Performing Loan (NPL), Constitutional Court Decision, Debt Collector, and Vehicle*